



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi letusan di Gunung Api Merapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 pukul 17.02 WIB sebagaimana dimaksud dalam Siaran Pers Nomor 56/HUMAS KESDM/2010 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 29 Oktober 2010 perihal Menteri ESDM Melepas Tim *Emergency Response Group* (ERG) ESDM Siaga Bencana Tahap Kedua ke Lokasi Gempa dan Tsunami Mentawai Serta Letusan Gunung Merapi;
 - b. bahwa perlu adanya Pendanaan Dana Darurat Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4562/SJ tanggal 12 November 2010 tentang Pendanaan Dana Darurat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 134, 162 dan 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembiayaan penanganan keadaan darurat akibat bencana alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540); dan sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

28. Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008;
- 29.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2004 Seri D Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2004 Seri D Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2004 Seri D Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2005 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2006 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010. (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010. (Berita Daerah Provinsi DIY Tahun 2010 Nomor 37);
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010;

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.483.751.313.692,00 mengalami perubahan pada Jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a.	Semula	Rp. 1.275.220.502.557,00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>00,00</u>
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.275.220.502.557,00
2.	Belanja		
	A.	Belanja Tidak Langsung	
	a.	Semula	Rp. 834.232.572.731,00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(13.633.000.000,00)</u>
		Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 820.599.572.731,00
	B.	Belanja Langsung	
	a.	Semula	Rp. 649.518.740.962,00
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>13.633.000.000,00</u>
		Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 663.151.740.962,00
		Jumlah Belanja	Rp. 1.483.751.313.693,00
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (208.530.811.136,00)
3.	Pembiayaan		
	a.	Penerimaan	
		1) Semula	Rp. 257.683.663.202,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>00,00</u>
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 257.683.663.202,00
	b.	Pengeluaran	
		1) Semula	Rp. 49.152.852.067,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>00,00</u>
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. <u>49.152.852.067,00</u>
		Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. <u>208.530.811.135,00</u>
		Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. <u><u>0,00</u></u>

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, rincian lebih lanjut dicantumkan pada Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET						
1 20 1 20 05 00 00 5 1 1 04 2	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	26,332,926,893	15,799,926,893	(10,533,000,000)	(40.00)	Pengurangan biaya pemungutan pajak daerah
	JUMLAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	26,332,926,893	15,799,926,893	(10,533,000,000)	(40.00)	
PPKD/BUD						
1 20 1 20 09 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa					
1 20 1 20 09 00 00 5 1 7 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa					
1 20 1 20 09 00 00 5 1 7 03 01	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	25,000,000,000	21,900,000,000	(3,100,000,000)	(12.40)	Pengurangan pada bantuan dalam rangka kunjungan Gubernur
	JUMLAH PPKD/BUD	25,000,000,000	21,900,000,000	(3,100,000,000)	(12.40)	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	51,332,926,893.00	37,699,926,893.00	(13,633,000,000.00)	(26.56)	

II. BELANJA LANGSUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
1 01 1 01 01 16	Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun					
1 01 1 01 01 16 015	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	-	444,375,000	444,375,000	100.00	Penyediaan Prasarana Pembelajaran Siswa
1 01 1 01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1 01 1 01 01 22 001	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	1,095,498,140	656,106,265	(439,391,875)	(40.11)	Pembatalan lomba seni dan kreatifitas siswa
	JUMLAH DINAS PENDIDIKAN	1,095,498,140	1,100,481,265	4,983,125	0.45	
RUMAH SAKIT GHRASIA						
1 02 1 02 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1 02 1 02 02 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	214,000,000	194,000,000	970.00	Pemindahan kantor Pemeliharaan/pembersihan kompleks
1 02 1 02 02 36	Pelayanan Kesehatan					
1 02 1 02 02 36 004	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	-	282,503,656	282,503,656	100.00	Evakuasi Pasien Pelayanan Pasien Rawat Inap Yang Tenang Pelayanan Kesehatan Lapangan (Trauma Centre) Pemindahan pasien dari PSBK
	JUMLAH RUMAH SAKIT GHRASIA	20,000,000	496,503,656	476,503,656	2382.52	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL						
1 03 1 03 01 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					
1 03 1 03 01 02 003	Pembangunan Gedung Kantor	260,000,000	527,600,000	267,600,000	100.00	Pembangunan SD sementara
1 03 1 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					
1 03 1 03 01 05 010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	60,000,000	-	(60,000,000)	(100.00)	Penundaan (kursus/pelatihan)
1 03 1 03 01 21	Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan					
1 03 1 03 01 21 001	Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	-	116,018,784	116,018,784	100.00	Pembersihan debu vulkanik
1 03 1 03 01 21 002	Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	-	8,202,000	8,202,000	100.00	Pengamanan jembatan
1 03 1 03 01 21 004	Operasional Tanggap Darurat	-	70,883,216	70,883,216	100.00	
1 03 1 03 01 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1 03 01 25 004	Pembuatan Sumur-sumur Air Tanah	-	150,000,000	150,000,000	100.00	Pembuatan sumur bor Operasional mobil tangki (5 unit) Rp. 24.750.000,00 Operasional truck HU (3 unit) Rp. 10.395.000,00 Operasional IPA (2 unit) Rp. 231.000.000,00
1 03 1 03 01 25 006	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	66,310,900	332,455,900	266,145,000	401.36	
1 03 1 03 01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
1 03 1 03 01 27 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	4,250,000,000	4,250,000,000	100.00	Pengadaan pipa untuk SPAMDES
1 03 1 03 01 28	Program Pengendalian Banjir					
1 03 1 03 01 28 007	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	-	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	Penanganan jalur sungai akibat lahar dingin
1 03 1 03 01 45	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah					
1 03 1 03 01 45 001	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	1,300,000,000	949,592,335	(350,407,665)	(26.95)	Penundaan sanimas untuk wilayah Kabupaten Sleman
1 04 1 03 01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					
1 04 1 03 01 16 004	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	-	100,000,000	100,000,000	100.00	Pembersihan fasilitas umum
1 04 1 03 01 16 010	Pendampingan Pembangunan Shelter	-	75,000,000	75,000,000	100.00	
1 04 1 03 01 16 011	Land Clearing	-	4,129,717,084	4,129,717,084	100.00	
1 04 1 03 01 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					
1 04 1 03 01 20 009	Pemakaman Massal	-	14,426,000	14,426,000	100.00	
1 04 1 03 01 20 010	Evakuasi dan Penguburan Hewan	-	20,270,000	20,270,000	100.00	
	JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1,686,310,900	11,744,165,319	10,057,854,419	596.44	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1 06 1 06 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
1 06 1 06 01 21 059	Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Awal Paska Bencana	-	350,000,000	350,000,000	100.00	
	JUMLAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	350,000,000	350,000,000	100.00	
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1 07 1 07 01 16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ					
1 07 1 07 01 16 007	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service	518,960,000	464,560,000	(54,400,000)	(10.48)	Penundaan pembayaran listrik karena pembangunan Halte belum 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 07 1 07 01 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
1 07 1 07 01 17 005	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum di Jalan	398,253,000	415,181,250	16,928,250	4.25	Pengalihan Patroli
1 07 1 07 01 17 023	Transportasi Logistik dan Pengungsi	-	58,800,000	58,800,000	100.00	
1 07 1 07 01 19	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu-Lintas					
1 07 1 07 01 19 001	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu-Lintas	168,270,900	178,270,900	10,000,000	5.94	Rambu Portable
1 25 1 07 01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa					
1 25 1 07 01 15 008	Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	179,429,950	124,645,000	(54,784,950)	(30.53)	Penundaan Pengiriman Kontingen Pertunra karena tidak lolos seleksi
1 25 1 07 01 15 018	Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	-	10,800,000	10,800,000	100.00	Posko Komunikasi
	JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,264,913,850	1,252,257,150	(12,656,700)	(1.00)	
BADAN LINGKUNGAN HIDUP						
1 08 1 08 01 15	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan					
1 08 1 08 01 15 05	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	-	65,000,000	65,000,000	100.00	
1 08 1 08 01 17	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam					
1 08 1 08 01 17 006	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	219,100,000	135,084,000	(84,016,000)	(38.35)	Penundaan kegiatan di wilayah Kecamatan Cangkringan
	JUMLAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP	219,100,000	200,084,000	(19,016,000)	(8.68)	
DINAS SOSIAL						
0 00 1 13 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
0 00 1 13 01 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63,472,000	78,472,000	15,000,000	23.63	Pemeliharaan/pembersihan kompleks PSAA dan PSTW
1 13 1 13 01 16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
1 13 1 13 01 16 006	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	-	77,197,150	77,197,150	100.00	Konsolidasi dan pendataan LUT korban merapi
1 13 1 13 01 16 010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	287,300,000	1,547,300,000	1,260,000,000	438.57	Operasional posko dan kelengkapannya
1 13 1 13 01 19	Pembinaan Panti Asuhan/Jompo					
1 13 1 13 01 19 003	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	-	70,785,000	70,785,000	100.00	Perlindungan anak
1 13 1 13 01 19 004	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti	3,006,569,875	3,176,444,875	169,875,000	5.65	Pemindahan Klien dari pengungsian ke PSAA dan PSTW Operasional PSAA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Asuhan/Jompo					
	JUMLAH DINAS SOSIAL	3,357,341,875	4,950,199,025	1,592,857,150	47.44	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
1 14 1 14 01 16	Peningkatan Kesempatan Kerja					
1 14 1 14 01 16 24	Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan	957,007,000	1,452,577,000	495,570,000	51.78	Pembersihan Pasar
	JUMLAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	957,007,000	1,452,577,000	495,570,000	51.78	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI						
1 15 1 15 01 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif					
1 15 1 15 01 15 033	Fasilitasi pengembangan koperasi	186,387,000	92,187,000	(94,200,000)	(50.54)	Penundaan kegiatan pendampingan dana penguatan modal koperasi
	JUMLAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	186,387,000	92,187,000	(94,200,000)	(50.54)	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1 19 1 19 01 15	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan					
1 19 1 19 01 15 025	Pengerahan Anggota SAR Linmas Dalam Rangka Evakuasi Korban	1,653,600,000	1,703,600,000	50,000,000	3.02	
1 19 1 19 01 22	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					
1 19 1 19 01 22 012	Faslitiasi Sekretariat Posko Tanggap Darurat	-	131,000,000	131,000,000	100.00	
	JUMLAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,653,600,000	1,834,600,000	181,000,000	10.95	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
1 19 1 19 02 15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan					
1 19 1 19 02 15 009	Pemantauan Pengamanan Aset Pemda di Zona KRB	215,000,000	234,800,000	19,800,000	9.21	
1 19 1 19 02 15 020	Patroli Tibum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah	175,000,000	243,090,000	68,090,000	38.91	Patroli Tibum dan ketentraman masyarakat di daerah KRB Merapi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	KRB					Piket harian di barak pengungsian Pengerahan pasukan untuk karya bakti sosial di kawasan barak pengungsian
	JUMLAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	390,000,000	477,890,000	87,890,000	22.54	
BIRO TATA PEMERINTAHAN						
1 20 1 20 03 01	Program Administrasi perkantoran					
1 20 1 20 03 01 018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	443,865,000	293,865,000	(150,000,000)	(33.79)	Penundaan perjalanan dinas ke Jakarta
	JUMLAH BIRO TATA PEMERINTAHAN	443,865,000	293,865,000	(150,000,000)	(33.79)	
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						
1 20 1 20 03	Program Peningkatan Analisis Kebijakan Pembangunan					
1 20 1 20 03 30 022	Penyusunan Database, Pemantauan Dan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi	201,259,000	72,630,000	(128,629,000)	(63.91)	Penundaan workshop database
	JUMLAH BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	201,259,000	72,630,000	(128,629,000)	(63.91)	
SEKRETARIAT DPRD						
1 20 1 20 04 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					
1 20 1 20 04 15 001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7,222,157,700	6,877,157,700	(345,000,000)	(4.78)	Sisa anggaran dukungan rancangan Perda
1 20 1 20 04 15 010	Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota	176,451,500	36,451,500	(140,000,000)	(79.34)	Sisa anggaran dukungan Pergantian Antar Waktu
1 20 1 20 04 15 015	Pembahasan LKPJ Gubernur DIY	455,121,700	355,121,700	(100,000,000)	(21.97)	Sisa anggaran dukungan pembahasan LKPJ Gubernur
	JUMLAH SEKRETARIAT DPRD	7,853,730,900	7,268,730,900	(585,000,000)	(7.45)	
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1 20 1 20 06 32	Program Pendidikan Kedinasan					
1 20 1 20 06 32 008	Diklat Struktural	6,732,064,325	6,373,210,325	(358,854,000)	(5.33)	Pengurangan karena pembatalan peserta dari luar DIY
	JUMLAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6,732,064,325	6,373,210,325	(358,854,000)	(5.33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
1 20 1 20 08 33	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur					
1 20 1 20 08 33 032	Pengadaan CPNS	959,794,500	1,159,794,500	200,000,000	20.84	
	JUMLAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	959,794,500	1,159,794,500	200,000,000	20.84	
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						
1 01 1 26 01 21	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
1 01 1 26 01 21 13	Layanan Perpustakaan	180,000,000	189,240,000	9,240,000	5.13	Layanan perpustakaan keliling
1 24 1 26 01 18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi					
1 24 1 26 01 18 13	Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan	50,000,000	51,130,000	1,130,000	100.00	Pemutaran Dokumen Audio Visual Arsip
	JUMLAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	230,000,000	240,370,000	10,370,000	4.51	
DINAS PERTANIAN						
2 01 2 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					
2 01 2 01 01 02 009 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70,550,000	23,250,000	(47,300,000)	(67.04)	Kegiatan ditunda karena berada di Ngipiksari Sleman
2 01 2 01 01 02 042 00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	110,700,000	10,700,000	(100,000,000)	(90.33)	Kegiatan ditunda karena berada di Ngipiksari Sleman
2 01 2 01 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
2 01 2 01 01 15 049 00	Pengembangan Sayuran Organik	-	135,000,000	135,000,000	100.00	Penanaman sayuran organik di 400 kepala keluarga
2 01 2 01 01 15 050 00	Pemangkasan dan Pembenhahan Tanaman Salak	-	284,800,000	284,800,000	100.00	Pembelian alat mesin pemangkas tanaman salak sebanyak 10 buah dan bantuan operasional
2 01 2 01 01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
2 01 2 01 01 16 056 01	Pengembangan Produksi Jagung Hibrida	110,204,000	-	(110,204,000)	(100.00)	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan
2 01 2 01 01 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
2 01 2 01 01 19 018 00	Penanganan GPP Pada Komoditas Unggulan	66,987,100	197,440,100	130,453,000	194.74	Analisa tanah dan buah salak
2 01 2 01 01 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
2 01 2 01 01 21 009 00	Pembakaran Bangkai Ternak	-	273,250,000	273,250,000	100.00	Pembakaran bangkai ternak
2 01 2 01 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
2 01 2 01 01 22 016 00	Pengembangan Ternak Unggas	29,577,000	198,577,000	169,000,000	571.39	Pemberian paket ayam buras di 400 kepala keluarga
2 01 2 01 01 22 019 00	Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi	299,972,500	364,997,500	65,025,000	21.68	Pembelian pakan ternak
	JUMLAH DINAS PERTANIAN	687,990,600	1,488,014,600	800,024,000	116.28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN						
2 02 2 02 01 20	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan					
2 02 2 02 01 20 005	Perencanaan Dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	91,105,400	50,000,000	(41,105,400)	(45.12)	Penundaan kegiatan karena adanya Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
	JUMLAH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	91,105,400	50,000,000	(41,105,400)	(45.12)	
DINAS PARIWISATA						
2 04 2 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2 04 2 04 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	410,000,000	340,000,000	(70,000,000)	(17.07)	Sisa penyediaan listrik
2 04 2 04 01 17	Program Pengembangan Kemitraan					
2 04 2 04 01 17 015	Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan	1,383,324,250	1,107,813,000	(275,511,250)	(19.92)	Penundaan kegiatan festival Panjat Tebing dan Jogja Air Show
	JUMLAH DINAS PARIWISATA	1,793,324,250	1,447,813,000	(345,511,250)	(19.27)	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
2 05 2 05 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					
2 05 2 05 01 20 003 00	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1,628,116,970	2,739,036,970	1,110,920,000	68.23	Pemberian paket budidaya lele di 400 kepala keluarga
	JUMLAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,628,116,970	2,739,036,970	1,110,920,000	68.23	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	31,451,409,710	45,084,409,710	13,633,000,000	43.35	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X